
KONFLIK POLITIK DALAM NOVEL ROYAN REVOLUSI KARYA RAMADHAN K.H (Sebuah Telaah Sosiologis - Historis)

Oleh: *Abd. Rahman D.S.*

Ahli Bahasa Indonesia Jurusan Dakwah STAIN Jember

Abstrak

Karya sastra dan masyarakat tidak dapat dipisahkan. Oleh sebab itu bentuk dan isinya lebih banyak diambil dari fenomena sosial atau sejarah. Fenomena sosial berupa konflik politik banyak diceritakan dalam novel Royan Revolusi. Konflik politik itu merembak kepada berbagai penyakit "royan" revolusi lainnya berupa manipulasi, korupsi, kolusi dan nepotisme yang menyengsarakan rakyat. Oleh karena itu, melalui tokoh Idrus (pemuda idealis), Ramadhan K.H. menentang segala bentuk kemerosotan moral dan mental yang pernah terjadi pada dekade '50-an itu. Melalui novel ini pengarang menasihati pembaca agar berhati-hati memilih pemimpin. Akan tetapi perlu diingat bahwa idealisme tanpa kompromi dengan kenyataan yang ada, akan banyak mengundang resiko.

Kata Kunci : Konflik Politik dan Royan Revolusi.

Pendahuluan

Karya sastra dan masyarakat tidak dapat dipisahkan karena pengarang (sastrawan) adalah anggota masyarakat (Sudjiman, 1988:12). Sebagai anggota masyarakat, sastrawan sering melihat, mendengar, bahkan mungkin pernah mengalami berbagai peristiwa. Dari peristiwa itu ada masalah yang paling menarik perhatian sastrawan untuk diceritakan kepada orang lain dalam bentuk karya sastra. Masalah yang diceritakan oleh pengarang itu dinamakan tema. Atau dengan kata lain, tema sebuah karya sastra

adalah sesuatu yang menjadi pikiran dan persoalan bagi pengarang (Ali, 1966:118). Secara implisit di dalam tema terdapat saran sebagai pesan moral disampaikan sastrawan kepada pembaca terhadap persoalan yang terimplisit dalam tema. Pesan sastrawan itu dinamakan amanat. Keberadaan tema dan amanat dalam karya sastra lebih merupakan unsur ekstrinsik daripada unsur intrinsik. Unsur ekstrinsik yang melatarbelakangi tema karya sastra antara unsur sejarah, politik dan agama.

Latar belakang sejarah yang tercermin dalam novel Royan Revolusi

cukup kompleks. Akan tetapi ekstrapolasi kesejarahan pada novel ini hanya diuraikan secara singkat dari dimensi kehidupan para politisi dan penguasa berupa konflik politik dengan judul Konflik Politik dalam Novel Royan Revolusi Karya Ramadhan K.H. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan deskripsi objektif tentang konflik politik yang pernah terjadi di Indonesia pada tahun 1950-an guna mendapatkan pelajaran berupa nilai-nilai moral Islami dalam berpolitik.

Hakikat dan Fungsi Karya Sastra

Wellek (1956:16) menjelaskan bahwa hakikat dari fungsi karya sastra adalah *dulce et utile*, yakni menyenangkan dan berguna. Dua hal ini secara integral harus ada dalam karya sastra, yang menyangkut unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur-unsur intrinsik dalam karya sastra membuat karya seni itu estetis, indah, menyenangkan.

Fungsi atau manfaat terdapat dalam karya sastra, karena dalam menulis, sastrawan tidak hanya mengandalkan bakat dan kemahiran berekspresi, tetapi lebih dari itu; dia memiliki visi, aspirasi, itikad baik, dan perjuangan. Akibatnya, karya sastra yang dihasilkan memiliki nilai tinggi (Semi, 1991:71). Oleh karena itu karya sastra sering dilihat sebagai suatu bentuk filsafat atau sebagai pemikiran yang terbungkus dalam bentuk khusus.

Ditinjau dari karya itu sendiri, Michel Zeraffa (dalam Fananie, 2000:194) mengemukakan bahwa bentuk dan isi

karya sastra sebenarnya memang lebih banyak diambil dari fenomena sosial dibandingkan dengan seni yang lain, kecuali film. Oleh karenanya karya sastra seringkali tampak terikat dengan momentum khusus dalam sejarah masyarakat. Dalam hal ini karya sastra (novel) memiliki suatu fungsi pengilhaman dalam pengertian aspek-aspek kehidupan sosial, politik, ekonomi, atau pun budaya. Itulah sebabnya karya sastra dapat berfungsi sebagai rekaman peristiwa pada masa karya itu ditulis dan sekaligus dapat dijadikan sumber data bagi kegiatan penelitian tertentu.

Menurut Swingwood (1972:43) terdapat tiga perspektif berkaitan dengan keberadaan sastra. *Pertama*, adalah perspektif yang memandang sastra sebagai dokumen sosial yang di dalamnya merupakan refleksi situasi pada masa sastra itu diciptakan; *kedua* adalah perspektif yang mencerminkan situasi sosial penulisnya, dan *ketiga*, adalah model yang dipakai karya sastra tersebut sebagai manifestasi dari kondisi sosial budaya, politik, ekonomi atau peristiwa sejarah.

Peristiwa yang terjadi di dalam novel adalah peristiwa fiktif hasil olahan imajinasi dan fantasi sastrawan berdasarkan fakta di lapangan. Demikian juga para pelaku cerita adalah manusia imajiner, manusia yang keberadaannya di pentas cerita berdasar/ menurut imajinasi sastrawan. Oleh karena itu, fenomena yang terjadi itu merupakan mimetis (peniruan) peristiwa yang pernah terjadi. Sastrawan

melakukan kodifikasi terhadap fakta berbeda dengan sejarawan. Karya sastra berbeda dengan karya ilmiah, walaupun di dalam karya sastra terdapat hal-hal yang ilmiah. Novel akan banyak memberikan informasi ilmiah dan pesan moral yang bermanfaat kepada pembacanya jika dilakukan apresiasi berupa pendekatan dengan melakukan interpretasi terhadap adegan-adegan yang terjadi di dalamnya.

Temuan dan Pembahasan Data

Sumber data yang dipilih dalam kajian ini adalah novel *Royan Revolusi* karya Ramadhan K.H. Novel ini diterbitkan PT Gurung Agung Jakarta cetakan pertama tahun 1971 terdiri atas 306 halaman. Novel ini berhasil keluar sebagai pemenang pertama Sayembara UNESCO - IKAPI tahun 1968. Novel ini dipilih sebagai sumber data karena isinya sarat tentang konflik politik yang dilakukan oleh para aktifis partai politik.

Data yang diperlukan berupa data kualitatif, karena berkenaan dengan nilai. Instrumen kunci pengumpul data adalah peneliti sendiri.

Metode yang digunakan, metode pendekatan dengan : membuat kriteria tentang konflik politik, hakikat dan fungsi karya sastra, novel, serta tema dan amanat. Selanjutnya dikumpulkan dengan teknik dokumentasi, yakni membaca teks novel tersebut. Kemudian peneliti mengidentifikasi dan mencatat data yang sesuai dengan tujuan kajian berupa konflik politik. Temuan data dibahas secara deskriptif

sesuai dengan tujuan penelitian.

Pendekatan lain yang digunakan dalam telaah ini adalah pendekatan semiotik. Pendekatan ini beranggapan bahwa dalam teks sastra memiliki tanda-tanda. Peirce (dalam Zoest, 1993:23) menyebutkan bahwa tanda itu berupa ikon, indeks, dan simbol. Simbol adalah tanda yang menunjukkan hubungan berdasarkan konvensi masyarakat, misalnya "Beberapa bendera merah dipasang di lapangan itu" (Royan Revolusi, hlm. 267). Partai berbendera merah tersebut dapat ditafsiri partai PKI atau PNI karena dua partai itu berbendera merah. Penafsiran itu juga ditentukan oleh konteks yang ada. Dalam pembahasan selanjutnya novel *Royan Revolusi* disingkat RR.

Konflik Politik dalam RR

Dari keseluruhan isi cerita dalam novel ini, dapat diketahui bahwa berbagai penyakit royan terjadi di Indonesia sebagai negara yang baru merdeka berupa : korupsi, manipulasi, keterbengkelaian hukum dan beberapa kemerosotan moral lainnya dilakukan oleh teman-teman seperjuangan Idrus, para penguasa, dan orang-orang oportunistis yang memang sengaja memanfaatkan kesempatan. Orang-orang partai sangat fanatik kepada ideologi yang dianutnya dan menganggap orang-orang yang di luar partai atau golongannya sebagai lawan politiknya. Partai-partai telah mendudukkan dirinya di atas rakyat dengan disokong oleh uang, organisasi, dan propaganda. Kekuasaan rakyat pada

hakikatnya telah menjadi kekuasaan partai yang menjadi kekuatan kelompok; ialah kelompok jahat, kelompok koruptor (RR hlm. 160-163).

Konflik ideologi antara partai-partai politik itu menimbulkan sistem golongan dan sistem famili (kolusi dan nepotisme). Akibatnya, Idrus dan Saleh menganggur. Beberapa kantor yang dilamarnya kantor-kantor itu telah tertutup bagi mereka karena dikuasai oleh orang-orang partai yang berbeda ideologinya. Letkol Mustafa dipecat karena tidak disukai oleh atasannya (RR hlm. 160-162). Maman selamat dari hukuman karena pamannya menjadi menteri dan ayahnya menjadi kepala polisi. Kasus penyelundupan gula yang dilakukan NVM (perusahaan milik Maman) di Bandung dilindungi oleh Samsu (pimpinan redaksi surat kabar) karena jika kasus itu diungkap, akan menggoncangkan kabinet dan menyangkut beberapa tokoh partainya (RR hlm. 170-171).

Pertentangan ideologi yang makin meruncing itu menimbulkan konflik politik pada partai-partai yang ada pada waktu itu. Partai politik yang semestinya didirikan sebagai penyalur aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat secara teratur sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang, pada jaman itu malah sebaliknya. Pada dekade itu partai-partai politik tidak lebih dari peniup kekusutan situasi saja (Amidalom, 1971).

Sehubungan dengan masalah ini Ali Audah dalam novelnya *Jalan Terbuka* mengolah masalah sosial dengan tema

kehidupan orang-orang partai pada tahun 1950-an yang destruktif. Ia mengkonstantir bahwa kehidupan orang-orang partai pada dekade itu bukan hanya merusak kehidupan rakyat kecil dan negara, tetapi diri mereka sendiri; meskipun ia mengakui pula bahwa pada tahun itu ada orang-orang partai yang cukup serius dan bertanggung jawab, seperti Letkol Mustafa, Idrus dan Saleh dalam novel *Royan Revolusi* (Sumardjo, 1979:45).

Dengan berbagai cara, tokoh-tokoh politik berlomba-lomba mencari simpati massa atau dukungan rakyat. Upaya mereka itu dilukiskan dengan secara panoramik sebagai berikut. "Beberapa ratus orang berkumpul di alun-alun menjadi tontonan orang yang lalu lintas di jalan besar. Beberapa bendera merah dipasang di lapangan itu. Hujan gerimis kecil. Seorang laki-laki yang mengenakan baju hitam nampak sibuk sekali hilir mudik membereskan kursi-kursi dan panggung. Bakal ada suatu pertemuan penting baginya. Memperkenalkan seorang petani. Petani yang maju. Menonjolkan petani yang menghasilkan padi lebih banyak dari petani lainnya. Menarik kesan, bahwa partainya benar-benar menaruh perhatian pada nasib kaum tani. Itu berarti pula mempropagandakan partainya. Segala untuk partainya. Segala demi partainya!" (RR hlm. 267).

Lukisan berbagai kejadian di atas mengingatkan kita kepada berbagai peristiwa yang terjadi pada masa demokrasi liberal yang sarat dengan konflik

politik, terutama menjelang pemilu tahun 1955. Pada masa itu muncul banyak partai politik, tidak kurang dari 11 partai, yaitu : Masyumi, PNI, NU, PKI, PSII, Parkindo, PSI, IPKI, Perti, Partai Katolik dan Partai Murba (Compton, 1993:274). Mencermati perilaku tokoh Idrus, Saleh, dan Letkol Mustafa yang ditampilkan Ramadhan secara dramatis sebagai tokoh protagonis menimbulkan *image* (kesan) bahwa mereka aktifis partai politik Masyumi yang konsisten memegang *khiththoh* (garis-garis besar perjuangan). Partai Masyumi dikenal sebagai musuh terkuat PKI (Compton, 1993:132).

Maswadi Rauf, Guru Besar Ilmu Politik FISIP UI (dalam Suhelmi, 1999:viii, ix) menjelaskan bahwa pada masa itu muncul berbagai partai politik yang mengatasnamakan Islam. Hal itu terjadi bukan disebabkan perbedaan-perbedaan dalam memandang Islam dan politik. Banyaknya partai-partai Islam lebih disebabkan oleh perbedaan-perbedaan kepentingan politik antara tokoh-tokoh Islam, meskipun mereka mempunyai pandangan yang sama tentang perlunya Islam dijadikan ideologi politik. Harapan memiliki partai tunggal bagi semua umat Islam di Indonesia tidak pernah terwujud, kecuali pada periode 1945-1952 yaitu Masyumi yang mempersatukan hampir semua partai Islam. Begitu konflik bersenjata antara Indonesia - Belanda diselesaikan dan negara kesatuan terbentuk kembali pada tahun 1950, konflik antara tokoh-tokoh Islam yang tergabung dalam

Masyumi segera merebak, yang berakhir dengan keluarnya PSII dan NU dari Masyumi.

Selanjutnya dijelaskan bahwa kepentingan politik yang memecah belah umat Islam pada waktu itu adalah masalah jabatan atau kedudukan. Masyumi pecah pada tahun 1952 karena ketidakpuasan pihak NU terhadap kursi menteri yang diberikan Masyumi kepada NU. Deliar Noer (1987: 81-88) menjelaskan bahwa meskipun kasus keluarnya NU dari Masyumi pada tahun 1952 cukup kompleks, namun kelihatannya salah satu faktor penyebab penting adalah pendapat mengenai kursi menteri bagi NU.

Aktifis salah satu partai politik Islam berpidato, "Lewat corong pengeras suara orang itu (Panji utusan dari puncak pimpinan partai Islam Jakarta, pen.) berteriak : - Di jaman sekarang kaum Muslimin mesti bersatu. Kita menghadapi kehancuran jika kita lalai terhadap musuh-musuh kita. Kaum Muslimin mesti mempunyai kekuatan untuk mempertahankan kemuliaan agama. Bukankah begitu? Itu saja pesan saya dan amanat kawan-kawan di ibukota yang kini sedang memperjuangkan dengan sengit nasib kita sebagai umat beragama. *Assalamu'alaikum - warohmatullahi - wabarokatuh.*" (RR hlm. 234).

Ia mendapat sambutan hangat dari hadirin padahal ia pernah terlibat dalam kasus korupsi kain kafan (RR hlm. 182). Di luar negeri ia sering melakukan seks bebas (selingkuh) dengan istri seorang pelaut

selama suaminya tidak di rumah (RR hlm. 116). Oleh karena perbuatannya itu, Idrus memperingati agar tidak berpidato seperti itu lagi karena hal itu justru akan menjatuhkan Islam dan menyuburkan gerakan komunis. "Macam dia pula yang kini memegang peranan di lingkungan umat Islam, kata Idrus kecewa pada dirinya sendiri. Macam dia yang jadi kepercayaan partai. Orang yang sudah menyelewengkan kain kafan diutus partai dengan membawa slogan untuk melawan komunis. Bagaimana mungkin! Mereka tidak sadar, bahwa dengan cara demikian mereka meruntuhkan partainya sendiri di mata umum dan menguntungkan gerakan komunis (RR hlm. 244-245). Hal itu terbukti enam tahun setelah peristiwa Madiun di akhir tahun 1948, parpol berbendera merah itu maju pesat sejak dipimpin D.N. Aidit pada awal tahun 1951, setelah lebih setahun tinggal di Cina dan Indocina. Pada pemilu pertama (29 September 1955) PKI tampil sebagai empat partai besar setelah PNI, Masyumi, dan NU. Menurut perhitungan Biro Pers Indonesia, PNI meraih suara 8.078.552 Masyumi 7.858.990, NU 6.465.378, PKI 6.008.502 (Compton, 1992:272).

Untuk menghadapi Pemilu 1955 itu para ulama mengadakan kongres di Medan. Mereka mengeluarkan fatwa yang antara lain berbunyi: "wajib hukumnya bagi umat Islam memilih partai Islam". Putusan Kongres Ulama Seluruh Indonesia di Medan tahun 1953 itu dipatuhi oleh kaum muslimin dan hasilnya menggembirakan.

Masyumi, tampil sebagai pemenang kedua.

Kepedulian ulama dalam Pemilu yang dilaksanakan oleh Kabinet Burhanuddin Harahap (dari Masyumi) itu penting/harus karena menyangkut kepentingan umat Islam. Rasulullah SAW telah bersabda, "*Man lam yahtamma bi amri muslimin fa laisa minhum* (barang siapa yang tidak mementingkan urusan kaum muslimin, maka ia bukanlah termasuk golongan mereka itu." (Firdaus A.N., 1999:35).

Tema dalam adegan ini mengandung amanat agar berhati-hati memilih pemimpin. Jangan dipilih sebagai pemimpin orang-orang yang avonturir hipokrit, aqidahnya masih labil.

Dalam konflik politik itu banyak orang oportunistis memanfaatkan situasi untuk memperkaya dirinya sebagaimana dilukiskan pada kutipan berikut. "Dengan seorang Cina yang bernama Boen, dia (Maman, pen.) membagikan barang-barang distribusi mendapat bantuan dari beberapa orang Belanda. Cita yang seharusnya dibagikan kepada rakyat, sebagian besar dibawa ke gudangnya sendiri. Kupon-kupon dari penduduk diborongnya dan cita itu dijualnya ke Glodok di Jakarta. Dia pun menjadi distributor minyak tanah, gula, dan berbagai bahan pokok lainnya. Usahanya itu meningkat sampai mengangkut gula, dengan menyulundup. Keistimewaannya yang luar biasa adalah bahwa Maman berani sekali menyogok petugas-petugas pemerintah. Hal itu dia peroleh dari pengalamannya bekerjasama dengan Cina.

'Demikian cara dagang kita dewasa ini', pernah Maman berkata, 'Dengan begitu kita bisa cepat jadi kaya. Jangan segan-segan memberikan hadiah persahabatan kepada orang yang pernah menolong kita, berupa lemari es, perabot rumah tangga, sampaipun mobil', katanya lagi." (RR hlm. 47-48).

Kutipan ini menunjukkan bahwa Maman (mantan kawan seperjuangan Idrus) melakukan korupsi, manipulasi, menyuap pejabat, rakus dan hedonis akibat pengalamannya bekerjasama dengan Boen, seorang Cina. Dalam adegan berikutnya, Maman diceritakan bekerjasama dengan Tek Ong (Cina) memeralat Rukomi, kepala desa untuk memeras kaum tani (RR, hlm. 287-300).

Dari konflik politik yang berkepanjangan itu, dari tahun 1950 hingga 1955 terdapat empat kabinet yang memerintah di NKRI. Kabinet-kabinet itu adalah: Kabinet Natsir (September 1950-Maret 1951), kabinet Sukiman (April 1951-Februari 1952), kabinet Wilopo (April 1952-Juni 1953) dan kabinet Ali Sastroamidjodjo I sejak Juli 1953 hingga Juli 1955 (Departemen Pertahanan Keamanan Pusat Sejarah ABRI, 1971:48). Oleh karena tiap-tiap kabinet tidak berumur panjang, maka programnya tidak sempat dijalankan sehingga menimbulkan banyak kepincangan, baik di bidang politik, sosial-ekonomi maupun keamanan dan akibatnya banyak urusan negara terbengkalai, rakyat menderita.

Selanjutnya disusul jaman

Demokrasi Terpimpin. Sistem itu dimaksudkan untuk mengembalikan semangat 1945 sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Akan tetapi sistem demokrasi tersebut ternyata makin lama makin jauh dari sasarannya. Akibatnya rakyat menyadari bahwa Demokrasi Terpimpin adalah diktator, dan pengaruh PKI makin lama makin besar. Ekonomi terpimpin berubah menjadi lisensi yang hanya menguntungkan segelintir orang-orang yang dekat dengan istana. Partai atau golongan yang tidak menyetujui kehendak pemerintah dianggap musuh yang anasional dan kontra revolusioner. Tuduhan itu dialami Letkol Mustafa. Ia dibebastugaskan. Bersama kawan-kawannya, ia ditahan karena dituduh telah membuat rencana menumbangkan pemerintah dengan kekerasan serta telah membangkitkan rasa provinsialisme tanpa bukti. (RR, hlm. 160 dan 256).

Setelah revolusi fisik, Cina menempati tempat-tempat strategis, "Ia (Idrus, pen.) memperhatikan rumah-rumah di pinggir jalan. Cina-Cina lagi, pikirnya. Merekalah yang paling dahulu mengisi rumah-rumah itu sesudah pertempuran berhenti. Dan kita harus terus mundur ke belakang. Dia ingat, di dekat sebatang sungai kecil, dekat tiang listrik yang besar, dahulu ada tukang jahit bangsa Indonesia. Waktu mobil lewat di situ ternyata Cina pula yang kini mengisinya. Yang tidak pernah mengungsi pun, pikir Idrus waktu melihat toko tukang tauco, mereka juga. Mereka tinggal di tempatnya masing-masing dan

keluarga mereka yang baru menempati toko-toko yang ditinggalkan bangsa kita." (RR, hlm. 56).

Kutipan ini melukiskan bahwa sejak revolusi fisik hingga merdeka, Cina di Indonesia selalu berada pada posisi enak. Itikat baik mereka terhadap bangsa dan negara Indonesia patut diwaspadai sampai sekarang.

Ketika kabinet Ali Sastroamidjodjo II berkuasa (dibentuk 24 Maret 1956) berkuasa, berkobarlah semangat anti Cina. Pada tanggal 5 Mei 1956 Presiden Soekarno menandatangani Undang-Undang Pembatalan KMB. Hal ini menimbulkan persoalan bagaimana nasib modal Belanda yang ada di Indonesia. Ada anjuran untuk mengadakan nasionalisasi atau Indonesianisasi terhadap perusahaan Belanda itu. Akan tetapi para anggota kabinet banyak yang menolak usul tersebut.

Pada waktu itu banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya, terutama kepada orang-orang Cina, karena pada umumnya merekalah yang beruang. Oleh karena itu, pada tanggal 19 Maret 1956 Mr. Assaat di depan Kongres Nasional Importir Indonesia di Surabaya mengatakan bahwa perlu sekali pemerintah mengeluarkan peraturan yang melindungi pengusaha-pengusaha nasional, sebab pengusaha-pengusaha Indonesia (pribumi) tidak mampu bersaing dengan pengusaha-pengusaha non pribumi, terutama Cina.

Pernyataan Mr. Assaat ini disambut hangat oleh masyarakat, dan lahirilah "gerakan Assaat" di mana-mana. Gerakan

ini ditanggapi oleh pemerintah dengan mengeluarkan statement dari Menteri Perekonomian Burhanuddin (Burhanuddin Harahap, tokoh dari partai Masyumi) bahwa pemerintah akan memberi bantuan, terutama kepada perusahaan-perusahaan yang sepenuhnya diusahakan oleh orang Indonesia. "Gerakan Assaat" ini akhirnya menimbulkan tindakan kekerasan; antara lain dengan melakukan perusakan toko mobil seorang pengusaha keturunan Cina sebagai balasan terhadap pemukulan seorang dokter tentara. Selain itu juga terdapat tulisan-tulisan anti Cina disebar di beberapa kota besar; seperti di Jakarta, Bandung, Semarang, dan Solo (Kartono, 1977).

Berbagai penyakit "royan" revolusi itu terjadi karena para pelakunya telah dijangkiti *vested - interest* atau terlalu mencintai dunia. Rasulullah S A W bersabda' "Akan datang suatu masa menimpa umat Islam, dimana mereka dikerumuni laksana orang mengerumuni hidangan. Bertanya seorang (sahabat), 'Apakah karena jumlah kami pada waktu itu sedikit? Jawab Rasulullah. Bukan, jumlah kamu pada waktu itu banyak, tapi tak ubahnya seperti buih di permukaan air. Allah mencabut dari dada musuh-musuh kamu sifat takut terhadap kamu, dan ditanamkan ke dalam jiwa kamu sifat lemah (*al-wahū*). Apakah yang dimaksud dengan *al-wahū* itu, ya Rasulullah? (tanya sahabat). Nabi menjawab, lemah (*al-wahū*) itu adalah : (1) cinta dunia dan (2) takut mati."

Sinyalemen Rasulullah itu kini

menjadi kenyataan. Umat Islam di dunia (termasuk di Indonesia) lemah; baik dalam bidang politik, ekonomi, pendidikan dan lain-lain. Umat Islam tertinggal dan ditinggalkan, dihitung tetapi tidak diperhitungkan. Penyebab utamanya karena mereka dihinggapi dua macam penyakit: cinta dunia dan takut mati. Yang dimaksud "takut mati" dalam hadits tersebut termasuk takut jatuh, takut berjuang, takut menghadapi risiko dan sebagainya. (Nasution, 1977:87).

Penutup

Berdasarkan temuan data dan hasil pembahasan data, disimpulkan bahwa novel Royan Revolusi isinya banyak menceritakan berbagai penyakit "royan" revolusi berupa manipulasi, korupsi, dan nepotisme yang menimbulkan konflik politik antar partai politik di Indonesia pada dekade tahun 1950-an. Keruntuhan mental dan moral itu dilakukan oleh orang-orang yang telah dijangkiti penyakit vested-interest.

Konflik politik itu membuat kabinet selalu berganti sehingga tidak sempat melaksanakan programnya. Akibatnya, banyak urusan negara terbengkelai. Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh Cina dan antek-anteknya untuk mendapatkan berbagai keuntungan yang membuat masyarakat petani menderita. Oleh sebab itu, lewat novelnya ini Ramadhan K.H. menyampaikan amanatnya agar kita berhati-hati memilih pemimpin.

Daftar Pustaka

- Ali, Lukman. 1967. *Bahasa dan Kesusastraan Indonesia Sebagai Cermin Manusia Indonesia Baru*. Jakarta: PT Gunung Agung.
- Amidalom, M. 21 Januari 1971. *Royan Revolusi Novel Ramadhan K.H.* Pemenang I Sayembara Unesco IKAPI Harian Kami, No. 1346, th. 5.
- Fanie, Zainuddin. 2000. *Telaah Sastra*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Firdaus A.N. 1999. *Dosa-Dosa Politik Orde Lama dan Orde Baru Yang Tidak Boleh Berulang Lagi Di Era Reformasi*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Heryanto, 1984. *Partai Politik Suatu Tinjauan Umum*. Yogyakarta: Liberty.
- Jassin, H.B. 1996. *Sastra Indonesia Sebagai Warga Sastra Dunia*. Jakarta: Yayasan Indayu.
- Kartodirdjo, Sartono; Djoened Poesponegoro, Marwati, dan Notosusanto, Nugroho. 1977. *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Nasution, M. Yunan. 1977. *Khutbah Jum'at*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Noer, Deliar. 1987. *Partai Islam di Pentas Nasional*. Jakarta: Grafiti pres.

Semi, Atar. 1993. *Metode Penelitian Sastra*. Bandung: Angkasa.

Sudjiman, Panuti. 1988. *Memahami Cerita Rekaan*. Jakarta: Pustaka Jaya.

Suhelmi, Ahmad. 1999. Soekarno Versus Natsir: *Kemenangan Barisan Megawati Reinkarnasi Nasionalis Sekuler*. Jakarta: Darul Falah.

Sumardjo. 1979. *Novel Indonesia Mutakhir: Sebuah Kritik*. Yogyakarta: Nur Cahaya.

Swingwood, Laurer son, Diana. 1972. *The Sociology of Literature*. London: Paladin.

Van Zoest, Aart. 1993. *Semistika, Tentang Tanda, Cara, Kerjanya, dan Apa yang Kita Lakukan Dengannya*. Jakarta: Yayasan Sumber Agung.

Wellek, Rene and Warren, Austin. 1956. *Theory of Literature*. New York: A Harvest Book Harcours, Brace & World, Inc.